

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya bukan hanya tentang membangun gedung, jalan, atau infrastruktur fisik lainnya. Lebih dari itu, pembangunan sejatinya adalah tentang membangun kapasitas manusia (Riyadi, 2004). Salah satu cara untuk membangun manusia adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya berbicara soal satu hal yaitu bagaimana warga tidak terus-menerus bergantung pada pihak lain, tapi punya kemampuan dan keberanian untuk mengelola hidupnya sendiri (Suharto, 2014).

Masih banyak kelompok masyarakat yang hingga hari ini hidup dalam kondisi yang tidak memberi mereka banyak pilihan karena terhimpit kemiskinan, jauh dari akses, dan berhadapan dengan ketidakadilan yang sudah berlangsung bertahun-tahun (Ife, 2016). Dalam kondisi seperti itu, perlahan-lahan kemampuan mereka untuk menentukan arah hidupnya sendiri terkikis (Narayan, 2005). Pemberdayaan bukan sekadar program atau jargon soal membantu orang menemukan kembali apa yang sebenarnya sudah ada dalam diri mereka, lalu menggunakannya untuk bangkit secara nyata dan berkelanjutan (Suharto, 2014).

Yang menarik sekaligus memprihatinkan, perempuan menjadi kelompok yang paling konsisten terpinggirkan dari proses pembangunan (Fakih, 2008). Bukan karena kapasitasnya kurang, melainkan karena struktur sosial yang ada memang tidak banyak memberi mereka ruang (Suharto, 2014). Patriarki yang mengakar kuat selama ini menempatkan perempuan pada posisi yang secara sistematis lebih rendah (Sefthiyan et al., 2014), dan dari situ muncullah anggapan bahwa tempat perempuan ya di rumah memasak, mengurus anak, melayani keluarga (Suyanto & Hendrarso, 1996). Pendapat mereka dalam pengambilan keputusan, sekecil apapun lingkupnya, kerap tidak dihitung (Padilah et al., 2025). Belum lagi berbagai bentuk diskriminasi yang datang berlapis mulai dari pelabelan negatif, beban kerja yang tidak pernah dianggap adil, hingga kekerasan yang sayangnya masih terus terjadi (Munte & Hafi, 2018).

Tapi ada sisi lain yang tidak bisa diabaikan. Kondisi ekonomi sekarang ini nyatanya makin memaksa perempuan untuk berdiri di garis terdepan menanggung beban yang dulu tidak pernah mereka bayangkan yang harus mereka pikul sendiri. Indraswari (2025) mencatat, tidak sedikit perempuan yang akhirnya menjadi tulang punggung keluarga, khususnya mereka yang ditinggal

suami entah karena bercerai atau karena kematian. Skalanya pun ternyata jauh lebih besar dari yang banyak orang sadari. Kemendukbangga mencatat 14,5 juta keluarga di Indonesia kini berada di bawah kepemimpinan perempuan sebagai kepala keluarga (Tribunnews, 2025). Dan ini bukan semata soal perempuan yang hidup sendiri. Indraswari (2025) mengingatkan bahwa sebagian dari mereka masih punya suami hanya saja penghasilan yang ada tidak cukup untuk menutup kebutuhan hidup sehari-hari. Soependi (2026) bahkan menemukan data yang cukup mengejutkan yaitu 40,77% perempuan pencari nafkah utama justru berstatus istri yang terpaksa mengambil alih karena suami kehilangan pekerjaan atau pendapatannya tidak stabil. Di luar itu, ada pula yang harus menanggung orang tua yang sudah sepuh dan tidak lagi sanggup bekerja. Maka bagi banyak perempuan, kemandirian ekonomi bukan soal pilihan hidup atau idealisme itu soal bertahan (Soependi, 2026). Mereka bergerak bukan karena ingin, tapi karena memang tidak ada jalan lain.

Tapi keinginan itu tidak serta-merta bisa terwujud begitu saja. Kenyataannya, perempuan masih sering kali terbentur pada hal-hal yang seharusnya bisa mereka akses sumber daya, pengetahuan, jaringan tapi nyatanya masih jauh dari jangkauan mereka (Jurnal Perempuan, 2006). Dari situlah program pemberdayaan perempuan menemukan alasan keberadaannya. Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam soal ini. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender lahir sebagai bentuk keseriusan itu semua kementerian dan lembaga diwajibkan untuk tidak lagi membuat kebijakan yang buta gender. Perspektif kesetaraan harus masuk sejak awal perencanaan, terus dijaga saat pelaksanaan, sampai diperiksa lagi di tahap evaluasi. Dengan kata lain, negara sudah menaruh tanda tangan di atas kertas bahwa pembangunan yang baik adalah yang tidak meninggalkan perempuan di belakang (Kementerian PUPR, 2016; Kemendagri, 2021).

Celah itulah yang kemudian diisi oleh LSM organisasi sipil yang bergerak di luar jalur pemerintah (Herdiansah, 2016). Kalau birokrasi sering kali lambat dan kaku, LSM punya kelebihan yang tidak dimiliki institusi formal yaitu mereka tahu betul medan yang mereka masuki, bisa bergerak lebih cepat, dan yang paling penting mereka bisa menjalankan program yang warganya ikut terlibat, bukan cuma jadi sasaran (Anggraeni et al., 2024). Inilah yang membuat kehadiran mereka tidak bisa dianggap remeh. Ada jarak yang selama ini mengangap antara kebijakan yang bagus di atas kertas dengan apa yang benar-benar dirasakan perempuan di lapangan dan LSM lah yang sering kali menutup jarak itu (Kemenko Kesra, 2011). Salah satu yang melakukannya di Sumatera Barat adalah LSM Pembangkit Batang Tarandam, atau PBT. Mereka

tidak hanya merancang program dari jauh, akan tetap PBT turun langsung, mendampingi, dan menginisiasi program Sekolah Perempuan di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, sebagai wujud nyata dari kerja pemberdayaan yang membumi.

Lubuk Kilangan yang merupakan kawasan rumah bagi PT Semen Padang dan kehadiran industri sebesar itu membawa dampak yang tidak kecil yaitu tanah yang terus berubah fungsi, lingkungan yang tertekan, dan penduduk yang datang pergi tanpa henti. Tapi di balik semua itu, warganya tetap hidup dalam ikatan adat Minangkabau yang kuat, dengan struktur *tungku tigo sajarangan* yang masih dipegang erat sampai sekarang. Dua hal itu tidak selalu cocok satu sama lain. Ekonomi industrial mendorong orang termasuk perempuan untuk bergerak, produktif, dan mandiri. Sementara norma adat yang berlaku punya caranya sendiri dalam mendefinisikan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan perempuan di luar rumah. Jadinya perempuan di Lubuk Kilangan berada di posisi yang serba tanggung dari satu arah mereka didorong maju, dari arah lain mereka ditahan. Pertentangan itulah yang membuat wilayah ini jadi tempat yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Dan di tengah pertentangan itulah LSM PBT masuk, mencoba mendampingi perempuan lewat program Sekolah Perempuan bergerak di ruang yang tidak sepenuhnya terbuka untuk perubahan.

Komitmen memang perlu, tapi ia tidak bisa terus-menerus tinggal jadi wacana. Harus ada yang benar-benar bergerak dan salah satu yang bergerak dengan cara tidak lazim adalah Sekolah Perempuan. Ide ini bermula dari KAPAL Perempuan, lembaga yang sudah lama berkuat mendampingi perempuan-perempuan yang jarang tersentuh program pemberdayaan kebanyakan. Dari awal perlu diluruskan bahwa ini bukan sekolah seperti yang ada di benak kita, di dalamnya tidak ada bangku berjajar, tidak ada seragam yang harus dipakai, tidak ada ijazah yang menunggu di akhir. Sekolah Perempuan lebih tepat disebut sebagai ruang tempat perempuan bisa duduk bersama, berpikir keras, dan perlahan mulai berani menyuarakan apa yang selama ini hanya tersimpan. Mereka tidak diajari untuk menerima keadaan begitu saja, melainkan didorong untuk mulai mempertanyakan banyak hal tentang kehidupan terutama terkait keadilan gender. Di Sekolah perempuan kepemimpinan ditumbuhkan dari dalam, kecakapan hidup diasah lewat praktik nyata, dan yang tidak kalah penting mereka diajak untuk ikut membentuk perubahan, bukan sekadar menunggu perubahan itu datang sendiri (Septiani, 2015; Misiyah & Ulfa Kasim, 2017).

Dalam prosesnya, keberhasilan ruang ini tidak diukur dari silabus atau modul yang tersusun rapi tapi soal bagaimana program ini memilih untuk tidak menggurui. Tidak ada yang datang membawa jawaban lalu membagikannya ke perempuan-perempuan yang dianggap tidak tahu apa-apa. Yang terjadi justru sebaliknya mereka duduk bersama, cerita tentang hidup masing-masing, dan dari situlah sesuatu mulai tumbuh (Pemerintah Kota Blitar, 2024). Hal-hal yang dibahas pun bukan teori yang jauh dari kenyataan, akan tetapi membahas tentang kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, cara mengelola uang di tengah kebutuhan yang tidak pernah cukup sampai sesuatu yang terdengar sederhana tapi ternyata tidak gampang dilakukan yaitu berani bicara, dan memastikan suara itu didengar. Akan tetapi inti dari semua itu sebenarnya satu hal saja, perempuan sudah terlalu lama ada di posisi yang sama selalu jadi yang dituju, yang dibantu, yang diputuskan nasibnya oleh pihak lain. Sekolah Perempuan mencoba menggeser itu pelan-pelan tapi serius mendorong perempuan untuk tidak lagi menunggu perubahan datang, tapi mulai jadi bagian dari perubahan itu sendiri (Naidoo, 2025).

Sampai awal 2020, Sekolah Perempuan sudah menapak di enam provinsi ratusan kelompok belajar berdiri, ribuan perempuan duduk di dalamnya dan ikut berproses. Bukan angka yang kecil, lebih dari itu angka-angka itu menjawab keraguan yang selama ini masih sering muncul bahwa perempuan, kalau diberi ruang yang sungguh-sungguh, tidak hanya berubah untuk diri sendiri tapi juga mulai menggerakkan lingkungan di sekitar mereka. Untuk bisa memahami kenapa Lubuk Kilangan secara khusus menarik untuk diteliti, perlu dilihat dulu apa yang membuat wilayah ini tidak bisa disamakan begitu saja dengan tempat lain.

Kota Padang jadi salah satu tempat di mana Sekolah Perempuan benar-benar menemukan tanahnya dan di sana, Kecamatan Lubuk Kilangan menjadi titik di mana program ini hidup dan berjalan. Tiga kelurahan jadi lokasi berlangsungnya kegiatan yaitu Baringin, Tarantang, dan Batu Gadang. Kemudian tidak satu pun dari ketiganya menjalankan program yang persis sama. Hal ini bukan karena tidak terkoordinasi, tapi memang sengaja disesuaikan dengan apa yang cocok di satu tempat belum tentu relevan di tempat lain. Di Baringin, perempuan-perempuannya memilih jalur budidaya jamur tiram. Di Tarantang, fokusnya beralih ke penggemukan sapi. Dan di Batu Gadang, sawah dan ladang jadi medan utama bercocok tanam padi yang sudah lama akrab dengan keseharian warganya.

Kajian tentang Sekolah Perempuan sebenarnya sudah cukup banyak dilakukan. Sutopo (2017) mengambil Kota Batu, dua studi terpisah menyoroti Kabupaten Gresik yakni Nurita, Murti, dan

Radjikan (2025), satu lagi oleh Shofiyyahtusya'diah dan Rahaju (2022), kemudian Iisdelima dan Amir (2024) memilih Kabupaten Pangkep sebagai medannya. Anehnya, meski daerahnya berbeda, pertanyaan yang mereka kejar tidak terlalu beranjak dampak ekonomi dan perubahan kesadaran gender di level individu terus menjadi titik pusat. Sementara itu, satu pertanyaan besar justru dibiarkan menggantung. Tidak banyak penelitian yang mau masuk lebih jauh untuk melihat apakah LSM pendamping benar-benar berhasil menggerakkan warga sampai pada titik *citizen control* (kendali warga) kondisi di mana warga bukan lagi objek program, melainkan pihak yang menentukan arahnya. Yang juga luput adalah sisi gesekannya bagaimana pemerintah lokal dengan segala keterbatasan dan kepentingannya bisa menjadi batu sandungan yang justru paling berdampak. Ini bukan hal kecil, pemberdayaan yang hanya diukur dari perubahan individu melewatkan sesuatu yang jauh lebih penting yaitu apakah komunitas itu akhirnya punya suara nyata dalam kebijakan publik atau tidak. Penelitian ini mencoba masuk ke ruang yang selama ini kosong. Fokusnya ada pada LSM Pembangkik Batang Tarandam (PBT) bagaimana mereka bekerja, strategi apa yang dijalankan, dan bagaimana relasi kuasa antara Sekolah Perempuan dengan pemerintah lokal di Kecamatan Lubuk Kilangan sesungguhnya berlangsung.

LSM Pembangkik Batang Tarandam (PBT) bukan sekadar lembaga yang datang membawa pelatihan lalu pergi. Sejak Sekolah Perempuan mulai berjalan di Kecamatan Lubuk Kilangan, LSM PBT ada di sana mengawal, mendampingi, memastikan prosesnya tidak mandek di tengah jalan. Yang mereka jaga bukan cuma konten pelatihannya, melainkan apakah perempuan itu benar-benar dilibatkan punya suara, punya tempat, bukan sekadar duduk dan mendengar. Maka untuk mengerti bagaimana partisipasi itu bisa tumbuh, cara kerja PBT adalah hal pertama yang perlu dibaca.

Berbagai penelitian tentang Sekolah Perempuan telah banyak dilakukan, namun umumnya berfokus pada dampak program terhadap peningkatan keterampilan ekonomi atau perubahan kesadaran gender pada tataran individu penerima manfaat. Studi yang secara spesifik dan mendalam menganalisis peran strategis LSM sebagai lembaga pendamping mencakup strategi mereka dalam mendorong partisipasi, mengelola dinamika kelompok, menghadapi resistensi sosial-budaya, dan menjalin negosiasi dengan pemangku kepentingan lokal masih sangat terbatas. Kekosongan inilah yang menjadi celah pengetahuan *research gap* (keterbaruan) yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Atas dasar pemikiran tersebut, penelitian ini hadir untuk secara spesifik mengkaji dan menganalisis peran LSM PBT dalam pemberdayaan perempuan melalui program Sekolah Perempuan di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Fokus utama diarahkan untuk mengungkap bagaimana LSM PBT menjalankan perannya sebagai fasilitator, dinamisor, dan advokator dalam mendorong partisipasi dan keberdayaan perempuan, serta mengidentifikasi hambatan yang mewarnai proses tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis tentang model peran LSM dalam konteks pemberdayaan perempuan di tingkat lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dipahami bahwa pemaparan tersebut telah menggarisbawahi sebuah realitas yang kontradiksi di satu sisi, negara memiliki komitmen formal terhadap pengarusutamaan gender melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000, namun di sisi lain, implementasi di tingkat lokal seringkali menghadapi hambatan struktural dan kultural yang kompleks (Munte & Hafi, 2018). Kompleksitas ini menciptakan ruang strategis bagi aktor non-pemerintah. Dalam konteks inilah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hadir bukan sekadar sebagai pelaksana program, melainkan sebagai katalisator yang menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan kebutuhan riil perempuan di akar rumput (Septiani, 2015). Keberadaan LSM Pembangkit Batang Tarandam (PBT) sebagai inisiator dan pendamping Sekolah Perempuan di Lubuk Kilangan menjadi contoh nyata dari peran strategis tersebut.

Sekolah Perempuan, sebagai wahana pendidikan kritis dan pemberdayaan, mendesain sebuah proses transformatif yang bertujuan mengubah perempuan dari objek pembangunan yang pasif menjadi subjek yang aktif berdaya (Misiyah & Ulfa Kasim, 2017). Namun, proses transformasi ini tidak berjalan dalam ruang hampa. Ia beroperasi di tengah kuatnya tarikan budaya patriarki dan struktur sosial yang membatasi, sebuah dinamika yang secara spesifik tercermin dalam dualisme masyarakat Lubuk Kilangan yang industrial sekaligus konservatif. Oleh karena itu, mempertanyakan bagaimana strategi LSM PBT dalam mengelola dinamika ini dan sejauh mana mereka berhasil mendorong partisipasi perempuan hingga ke level kendali penuh (*citizen control*) menjadi sangat fundamental.

Berbagai studi sebelumnya memang telah mengonfirmasi dampak positif Sekolah Perempuan terhadap peningkatan kapasitas individu, seperti keterampilan ekonomi di Kota Batu

(Sutopo, 2017) atau perubahan kesadaran gender di Kabupaten Gresik (Nurita, Murti, & Radjikan, 2025; Shofiyyah & Rahaju, 2022). Akan tetapi, sebagian besar studi tersebut masih berfokus pada tataran dampak dan perubahan pada diri perempuan itu sendiri. Masih terdapat kekosongan pengetahuan (*research gap*) yang signifikan mengenai analisis mendalam tentang peran multi-faset LSM pendamping sebagai fasilitator, dinamisator, dan advokator serta bagaimana mereka menegosiasikan hambatan eksternal, terutama resistensi dari pemangku kepentingan lokal, untuk memastikan keberlanjutan program (Iisdelima & Amir, 2024). Kekosongan inilah yang secara spesifik hendak diisi oleh penelitian ini. Atas pertimbangan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun sebagai berikut “Bagaimana peran LSM PBT dalam pemberdayaan perempuan di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil dari pemaparan latar belakang serta rumusan masalah yang sudah disampaikan diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu

1.3.1 Tujuan Umum

Mendeskripsikan peran LSM PBT dalam pemberdayaan perempuan di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Menganalisis peran LSM PBT (Pembangkit Batang Tarandam) dalam meningkatkan partisipasi anggota sekolah perempuan di Kecamatan Lubuk Kilangan.
2. Menganalisis hambatan yang dialami LSM PBT (Pembangkit Batang Tarandam) di Kecamatan Lubuk Kilangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik yang berarti bagi perkembangan ilmu sosiologi, terutama dalam memperkaya kajian-kajian seputar pemberdayaan masyarakat. Lebih jauh, studi ini dapat menjadi tambahan referensi dan literatur dalam memahami kompleksitas dinamika pemberdayaan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan strategis bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan regulasi terkait pemberdayaan masyarakat. Secara lebih spesifik, temuan dari studi ini dapat berkontribusi dalam perancangan kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan kaum perempuan, mengingat peran dan kontribusi mereka yang sangat vital dalam menopang pembangunan, terutama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.

